



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU  
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN**

**KLIPING MEDIA 2022**

**REJANG LEBONG**

**SABTU, 05 FEBRUARI 2022**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

☐ POSITIF ☒ NETRAL ☐ BAHAN PEMERIKSAAN ☐ PERHATIAN KHUSUS

**Di RL, 646 Randis Tunggak Pajak**

**CURUP** - Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) atau Samsat Kabupaten Rejang Lebong (RL) mencatat, sejak 2017 hingga 2021, total tunggakan pajak kendaraan dinas (Randis) Pemkab RL sudah di angka Rp 1,042 miliar. Dengan jumlah kendaraan dinas yang menunggak 646 unit. Jenis randis yang menunggak pajak tersebut mulai dari kendaraan Roda Enam (R6), kendaraan roda empat (R4) maupun kendaraan roda dua (R2).

Rinciannya, sambung Heppy, randis jenis jeep 15 unit, kendaraan jenis mini bus 65 unit dan jenis microbus

sebanyak 1 unit. Kemudian jenis kendaraan bus sebanyak 6 unit, jenis pikup sebanyak 48 unit, truk 18 unit dan sepeda motor 493 unit.

"Upaya penagihan sudah kita lakukan agar tunggakan pajak kendaraan milik Pemkab Rejang Lebong ini tidak terus bertambah. Namun dari koordinasi yang kita lakukan, salah satu alasan mengapa menunggak karena kondisi anggaran keuangan masing-masing OPD maupun secara umum Pemkab Rejang Lebong memang belum memungkinkan," terang Kepala UPTD PPD Kabupaten RL Heppy Yunizar Heppy.

Sedangkan untuk tahun 2021 lalu,

setidaknya ada 174 unit kendaraan dinas (Randis) Pemkab RL yang menunggak pajak. Nilai tunggakan pajak 174 unit kendaraan tersebut mencapai Rp 215,057 juta.

"Catatan kita ada 174 kendaraan dinas milik Pemkab Rejang Lebong yang menunggak tahun 2021 lalu. Nilai tunggakan atau tagihan 174 kendaraan dinas tersebut mencapai Rp 215,057 juta," terang Heppy Yunizar.

Saat dikonfirmasi, Sekda Rejang Lebong Yusran Fauzi, ST menyampaikan, mereka sudah berkoordinasi dengan pihak Samsat terkait tunggakan pajak tersebut. Saat ini

Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) masih melakukan proses validasi data kendaraan dinas. termasuk untuk menghitung dan mengetahui mana yang menunggak dan mana yang tidak.

"Pembayaran pajak dilakukan masing-masing OPD pemegang atang atau pengguna kendaraan. Makanya ini kita lakukan validasi data dulu dan disinkronkan dengan data di Samsat. Kalau nanti data sudah valid, selanjutnya kita akan berupaya menyelesaikan tunggakan di setiap tahun anggaran," singkat Yusran.(dtk)